

Digitalisasi Budaya Politik Melalui Peran Generasi Milenial dan Gen Z Di Indonesia

Sion Hutajulu¹, Stiven Ginting², Yehezkiel Manasyekh³

^{1,2,3} Universitas Kristen Indonesia

Email : hutajulusion73@gmail.com, yehezkielindrajaya@gmail.com
stivenjonatan538@gmail.com

Abstract. *In this paper, the digitalization of politics is discussed through the role of millennials and Gen Z in Indonesia. Millennials and Gen Z can utilize social media and technology to voice their opinions, raise political awareness, and actively participate in the democratic process. For example, they can organize social actions or conduct political campaigns through internet platforms in the political context, spreading boaxes has become easier and faster thanks to advances in technology and social media. As a result, there needs to be an effort to solve this problem. Improving digital literacy and educating people on how to find and verify information. Before sharing are steps that can be taken. In addition, the government, educational institutions and the media should be active in combating the spread of houxes.*

Keywords: *Millennial, Gen Z, Election, Politics*

Abstrak. Dalam makalah ini, digitalisasi politik dibahas melalui peran generasi milenial dan Gen Z di Indonesia. Milenial dan generasi 2 dapat memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk menyuarakan pendapat mereka, meningkatkan kesadaran politik, dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Misalnya, mereka dapat mengatur aksi-aksi sosial atau makan kampanye politik melalui platform internet. Dalam konteks politik, menyebarkan hoax menjadi semakin mudah dan cepat berkat kemajuan teknologi dan media sosial. Akibatnya, perlu ada upaya untuk menyelesaikan masalah ini. Meningkatkan literasi digital dan mendidik masyarakat tentang cara menemukan dan memverifikasi informasi sebelum dibagikan merupakan langkah yang dapat diambil. Selain itu, pemerintah, lembaga pendidikan, dan media. Harus aktif dalam memerangi penyebaran hoax

Kata kunci: Milenial, Gen Z. Pemilu, Politik

LATAR BELAKANG

Pada tahun 2045, dua kelompok—Generasi Z dan Generasi Milenial—digabungkan untuk membentuk "pilar generasi emas". sebagian warga negara Indonesia adalah GEN Z antara 1997 dan 2012, yang mencapai 75,49 juta orang, atau 27,49 persen dari 270,2 juta penduduk, menurut Sensus 2020. Di belakang mereka adalah Generasi Milenial, yang lahir antara 1981 dan 1996, yang mencapai 69,90 juta orang, atau 25,87 persen dari total penduduk. Artinya, Gen Z dan milenial lebih dari setengah masyarakat Indonesia. Dari jumlah ini kedua kumpulan bisa dipertimbangkan dalam berbagai bagian kehidupan.

Generasi Z dan Milenial dianggap kurang terlibat dalam politik dan bahkan apatis. Namun, situasi saat ini berbeda. Generasi Z dan milenial sering menjadi pelaku perubahan budaya politik, terutama dalam hal partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif. Mereka menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan pesan politik mereka, mengorganisir aksi protes atau kampanye, dan juga memanfaatkan teknologi digital untuk dengan cepat dan mudah mendapatkan informasi politik.

Generasi Z dan milenial memilih untuk ikut andil memperjuangkan HAM, isu lingkungan, serta kesetaraan gender dalam politik. Selain itu, mereka menggunakan platform daring seperti media sosial untuk menggunakan suara mereka dan membentuk opini publik. Generasi ini telah berhasil memperjuangkan masalah yang ada di masyarakat. Milenial dan Gen Z telah terbukti menjadi kelompok yang sangat penting dalam hal pemilihan umum. Mereka memiliki banyak suara, tetapi mereka sering berbeda dengan kelompok demografi yang lebih tua dalam hal politik. Akibatnya, untuk mendapatkan dukungan dari generasi muda, partai politik belakangan ini sering mencoba memperjuangkan masalah yang penting bagi kedua kelompok tersebut.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z dan Milenial, yang terdiri dari orang-orang berusia 17 hingga 39 tahun, akan membentuk mayoritas pemilih pada Pemilu 2024 mendatang (CSIS, 2020). Milenial dan Generasi Z pasti akan memainkan peran penting dalam Pemilu 2024. dapat dilihat, para penyelenggara pemilu merekrut anak-anak muda di tingkat daerah untuk KPU dan Bawaslu daerah, yang menunjukkan posisi penting tersebut dapat dilakukan oleh anak muda.

Tapi masalahnya adalah banyak orang masih memandang remeh peran anak muda di pemilu. seringkali, anak muda dianggap tidak penting dan tidak diakui kemampuannya. Banyak alasan mengapa generasi milenial dan generasi Z tidak diterima dan dianggap tidak kompeten dalam penyelenggaraan pemilu. Mereka dianggap tidak terlibat secara politik, yang merupakan salah satu penyebabnya. Banyak orang yang tidak yakin dan tertarik dengan proses politik dan pemilu mereka cenderung menghindari memberikan suara mereka pada pemilihan.

Untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul di kancah politik, Generasi Milenial dan Generasi Z bukan sekedar dianggap sebagai lumbung suara; mereka memiliki peran penting dalam penyebaran wawasan politik dan pentingnya keterlibatan mereka secara positif dalam politik nasional. Tidak diragukan lagi, memasukkan para anak muda itu ke dalam dunia politik adalah sesuatu yang tidak boleh disepelekan, terutama untuk mereka yang cenderung apatis. Untuk membuat politikus dan elit nasional tertarik dalam dunia politik, mereka harus menunjukkan contoh dan praktik yang baik.

karena peralihan kepemimpinan di tingkat nasional dan daerah sedang berlangsung, itu pasti dapat dimulai dengan Pemilu 2024. Dengan memberikan wawasan politik positif yang menunjukkan kepedulian terhadap aspirasi anak-anak muda, para politikus, partai politik, dan elit politik harus masuk ke basis-basis pemuda.

Berpolitik tidak boleh dilakukan dengan cara yang buruk, terutama sampai konten negatif membanjiri internet, tempat anak muda berkumpul. Jika isu SARA, politik identitas, kampanye hitam, primordialisme, serta metode buruk lainnya digunakan, mereka hanya akan membuat generasi muda menjadi apatis terhadap dunia politik, dan lebih berbahaya karena berpotensi memecah-belah bangsa. Generasi Z dan milenial memerlukan pendekatan inovatif dan kreatif dari orang-orang yang lebih tua di dunia politik. Metode yang dianggap terlalu kaku oleh generasi lama harus diperbaiki agar lebih sesuai dengan kedua generasi ini. Oleh karena itu, bukan malah memaksakan gaya hidup generasi tua kepada Gen Z dan Milenial

(Evita dkk. 2023) telah meneliti pola pencarian informasi secara keseluruhan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Evita dkk. menunjukkan bahwa sumber informasi utama Generasi milenial dan GEN Z berasal dari aplikasi media sosial dan pesan instan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan utama media Generasi Z adalah mencari hiburan, mereka juga mencari informasi yang lebih serius/non-hiburan, seperti pendidikan dan pekerjaan. Penelitian ini dimulai dengan penelitian Evita dkk. Informasi tentang pendidikan dan karir juga tentu terkait dengan politik dan pemilu karena program kerja yang berkaitan dengan topik ini mungkin ditawarkan oleh calon legislatif dan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian Evita dkk. untuk mengetahui pola pencarian informasi Generasi Z dan milenial, khususnya informasi politik.

Penulis ingin mendalami tentang masalah kesenjangan akses generasi milenial dan Gen Z mungkin tidak memiliki akses yang sama ke teknologi digital, yang dapat menyebabkan kesenjangan dalam partisipasi politik, di mana beberapa orang mungkin tertinggal dalam mengakses informasi politik dan terlibat dalam diskusi. Validitas penyebaran informasi yang cepat dan mudah dalam era digital dapat menjadi buruk jika tidak diverifikasi. Milenial dan Gen Z dapat terpengaruh oleh berita palsu dan propaganda politik yang tersebar luas di media sosial. Bagaimanakah sikap milenial dan gen Z menghadapi maraknya propaganda politik supaya tidak terpengaruh berita palsu yang beredar di media?

LANDASAN TEORI

Teori Demokrasi Partisipatif

Teori ini dikemukakan oleh JOHN STUART DAN GDH COLE pada abad 21 ialah suatu bentuk pemerintahan di mana warga negara berpartisipasi secara individu dan langsung dalam keputusan dan kebijakan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka, bukan melalui perwakilan terpilih kemudian ditinjau kembali oleh CAROLE PATEMAN 2019 dengan argumennya mengenai perubahan yang akan menjadikan kehidupan sosial dan politik kita lebih

demokratis, yang akan memberikan peluang bagi individu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari serta dalam sistem politik yang lebih luas. Teori demokrasi partisipatif dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi politik dengan memberi setiap orang kesempatan yang sama dan suara untuk membuat keputusan politik. Oleh karena itu, diharapkan bahwa warga negara akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk terlibat aktif dalam kebijakan publik dan memiliki akses yang lebih besar ke partisipasi politik. Dengan cara menyuarakan melalui media sosial dan memberikan pendapat ataupun menyuarakan hak. Selain itu, tujuan teori demokrasi partisipatif adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih demokratis di mana keputusan politik didasarkan pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dengan mendorong partisipasi yang lebih besar, teori ini bertujuan untuk mengurangi jarak kekuasaan dan memperkuat partisipasi warga negara dalam proses politik. Teori demokrasi partisipatif berhubungan dengan beberapa teori lain. Salah satu teori yang terkait dengan demokrasi partisipatif adalah teori demokrasi deliberatif, yang menekankan pentingnya berbicara dan berdebat secara objektif selama proses pengambilan keputusan politik. Dalam demokrasi partisipatif, teori demokrasi deliberatif mendorong semua orang untuk berpartisipasi.

Teori Demokrasi Partisipatif mengatakan bahwa demokrasi dapat diperkuat dengan partisipasi aktif masyarakat dalam politik. Milenial dan Gen Z menggunakan platform online seperti Instagram, TikTok, dan Twitter untuk berbicara, menyuarakan pendapat, dan terlibat dalam kampanye politik. Digitalisasi budaya politik dapat mendorong generasi muda untuk berpartisipasi aktif dan inklusif dalam gerakan politik, menyebarkan informasi, dan berkontribusi pada keputusan politik melalui partisipasi mereka dalam forum online. Selain itu, digitalisasi budaya politik juga dapat memenuhi keinginan generasi milenial dan Gen Z dengan memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi langsung dalam proses politik, memilih dan mendorong perubahan sesuai dengan nilai-nilai mereka. Generasi ini dapat merasa lebih terlibat, didengarkan, dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi masa depan masyarakat jika mereka berpartisipasi dalam demokrasi partisipatif.

Teori demokrasi partisipatif memiliki 4 asumsi, asumsi pertama Teori demokrasi partisipatif berasumsi bahwa partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan dapat memperkuat demokrasi. Teori ini berpendapat bahwa partisipasi publik yang lebih besar dan aktif akan menghasilkan keputusan yang lebih representatif yang kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Asumsi kedua teori demokrasi partisipatif,

partisipasi publik tidak hanya terbatas pada pemilihan umum itu juga mencakup berbagai bentuk partisipasi, seperti diskusi publik, konsultasi, aksi kolektif, dan pemantauan pemerintah.

Asumsi ketiga ini menganggap partisipasi publik sebagai cara untuk meningkatkan legitimasi pemerintah dan mendorong akuntabilitas. Teori demokrasi partisipatif berharap dapat memungkinkan penglibatan warga negara secara aktif dalam proses politik untuk menghasilkan sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat. Asumsi keempat berpendapat bahwa Gen Z memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi. Teori ini berpendapat bahwa partisipasi aktif generasi kita dapat mengubah sistem politik secara positif. generasi milenial dan Gen Z sangat relevan dengan teori demokrasi partisipatif. Generasi ini memiliki akses yang luas ke media sosial dan teknologi, yang dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Gen Z dan milenial biasanya lebih aktif di media sosial dan mampu menyebarkan informasi dengan cepat. Mereka juga memiliki keinginan yang kuat untuk membantu mengubah sistem politik dengan cara yang baik. Generasi ini dapat berpartisipasi dalam diskusi politik, berbagi pendapat mereka, dan mendukung masalah yang mereka pedulikan dengan menggunakan teknologi dan media sosial. Mereka juga dapat menggunakan platform online untuk mempengaruhi opini publik dan memperluas jangkauan pesan politik. Namun, penting bagi generasi ini untuk memahami bahwa partisipasi politik tidak hanya terjadi di dunia maya; mereka juga perlu terlibat secara langsung dalam kegiatan politik masyarakat, seperti menghadiri pertemuan publik, berbicara dengan orang-orang yang memiliki perspektif berbeda, dan memilih pemimpin yang mewakili prinsip-prinsip mereka. Sebagai generasi milenial dan Gen Z, kita memiliki potensi besar untuk mengubah sistem politik secara positif melalui partisipasi politik kita.

PEMBAHASAN



penggunaan media sosial oleh milenial dan Gen Z Indonesia untuk menyuarakan pendapat politik mereka. Mereka mengungkapkan aspirasi dan kritik terhadap masalah politik yang mereka pedulikan dengan menggunakan platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok.

Digitalisasi budaya politik memungkinkan generasi muda untuk lebih banyak berpartisipasi dan berkontribusi dalam dunia politik Indonesia. Generasi milenial dan Gen Z Indonesia memiliki persepsi politik yang sangat dipengaruhi oleh media sosial. Media sosial membuatnya mudah untuk mengakses informasi politik dan berinteraksi dengan berbagai pandangan dan opini. Namun, media sosial juga rentan terhadap penyebaran informasi yang salah atau berita palsu, yang dapat mempengaruhi persepsi politik mereka. Selain itu, media sosial memberi Gen Z dan milenial kesempatan untuk berbicara dan berbagi pandangan politik mereka, yang dapat memperkuat keyakinan dan prinsip politik mereka. Menurut Yuliandre Darwis, Komisioner KPI Pusat, kehadiran media sosial untuk mendapatkan suara anak-anak muda dan melibatkan mereka dalam dunia politik adalah hal yang wajar di era teknologi modern. Doktor komunikasi massa ini menyebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh anak-anak muda saat mereka menggunakan media sosial untuk menyuatkan tujuan politik mereka. Yuliandre mengatakan bahwa Generasi Z dan Milenial harus berhati-hati dan bertindak bijak karena fakta bahwa banyak informasi palsu tersebar selama Pemilihan Umum 2019, mulai dari berita bohong, hasutan, ujaran kebencian, dan lainnya. Sangat penting untuk berpolitik di media sosial, terutama bagi anak-anak muda. Dia mengatakan, "Saring terlebih dahulu sebelum berbagi dan lakukan tabayun, mengecek terlebih dahulu kebenaran suatu informasi." Selain itu, generasi tua memainkan peran penting dalam digitalisasi politik kepada generasi milenial dan gen Z karena mereka dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan politik mereka melalui media sosial atau platform online lainnya. Dengan berbagi pemahaman mereka tentang sejarah politik dan nilai-nilai yang mereka anut, generasi tua dapat membantu generasi milenial dan gen Z memahami konteks politik yang lebih luas, dan juga dapat memberikan pandangan dan perspektif mereka. Generasi milenial dan Gen Z akan memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan masa depan politik Indonesia! Mereka adalah generasi yang penuh semangat, ide-ide kreatif, dan keinginan untuk mengubah dunia dengan cara yang positif. Generasi milenial dan gen Z memiliki akses yang luas ke media sosial dan teknologi, sehingga mereka dapat dengan mudah berkomunikasi, berbagi ide, dan menyuatkan aspirasi politik mereka. Mereka juga aktif dalam gerakan sosial dan mendukung isu-isu penting seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan lingkungan. Dengan partisipasi dan kontribusi mereka, mereka memiliki potensi besar untuk membentuk masa depan politik Indonesia yang lebih inklusif, progresif, dan berkelanjutan. Gen Z dan milenial memiliki preferensi politik yang berbeda. Tidak mungkin mengatakan bahwa mereka memiliki preferensi politik yang sama. Terlepas dari generasi, setiap orang memiliki perspektif dan prinsip politik yang berbeda.

Namun, beberapa tren dapat dilihat. Studi menunjukkan bahwa generasi milenial dan Gen Z cenderung lebih mendukung masalah seperti inklusi sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Mereka juga cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan beragam, dan lebih aktif terlibat dalam gerakan sosial. Namun, penting untuk diingat bahwa ini adalah generalisasi, dan setiap orang memiliki preferensi politik yang berbeda. Milenial dan Gen Z memiliki perspektif yang berbeda tentang pelanggaran politik. Korupsi, nepotisme, penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, dan manipulasi informasi adalah beberapa contohnya. Generasi ini cenderung menentang pelanggaran dan menginginkan pemimpin yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Selain itu, mereka berfokus pada masalah seperti ketidaksetaraan, ketidakadilan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, penting untuk diingat bahwa ini adalah generalisasi, dan tidak ada satu pun orang yang memiliki perspektif yang sama tentang pelanggaran politik. Generasi Z dan milenial memiliki hubungan yang kuat dengan teori demokrasi partisipatif, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik. Generasi Z dan milenial, yang memiliki akses mudah ke teknologi dan media sosial, memiliki peluang besar untuk terlibat secara langsung dalam politik. Mereka dapat menggunakan platform digital untuk menyuarakan pendapat, berbagi informasi, dan bahkan memobilisasi gerakan politik. Dalam konteks demokrasi partisipatif, generasi Z dan milenial memiliki kesempatan untuk membentuk agenda politik, mempengaruhi kebijakan publik, dan mendapatkan suara mereka didengar.



Melalui partisipasi aktif, generasi Z dan milenial dapat membawa perubahan positif dalam sistem politik dan memperjuangkan isu-isu yang mereka anggap penting. Ada beberapa kasus hoax terkait pemilu. Hoax adalah informasi palsu yang disebarkan dengan tujuan menyesatkan atau mempengaruhi opini publik. Selama pemilu, sering terjadi klaim palsu atau manipulasi fakta yang dimaksudkan untuk memengaruhi hasil pemilihan atau menimbulkan ketegangan di masyarakat. Beberapa contoh hoax yang terjadi selama pemilu adalah berita palsu tentang calon yang disebarluaskan di media sosial, tuduhan tentang kecurangan yang

terjadi selama pemilu, atau manipulasi gambar dan video untuk memengaruhi persepsi publik. Sebagai konsumen informasi, penting bagi kita untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya agar kita tidak tertipu oleh hoax yang dapat merusak proses demokrasi. Ada sejumlah tindakan yang dapat diambil untuk menghilangkan hoax tentang demokrasi yang dibuat oleh generasi milenial dan Gen Z. Pertama, meningkatkan literasi media dan informasi sangat penting. Generasi Z dan milenial harus memiliki kemampuan kritis untuk memilah dan memverifikasi informasi yang mereka terima. Mereka dapat belajar untuk memeriksa berbagai sumber, membandingkan sumber, dan menemukan fakta yang tepat sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi. Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran digital. Generasi milenial dan Gen Z harus memahami bagaimana tindakan mereka berdampak di dunia digital. Mereka harus mempertimbangkan akibat menyebarkan hoax dan memilih untuk menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang benar dan akurat. Selain itu, bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam memerangi hoax juga penting. Milenial dan Gen Z memiliki kesempatan untuk bergabung dengan gerakan atau organisasi yang berfokus pada memerangi hoax dan menyebarkan informasi yang benar. Mereka juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kampanye sosial media yang mengajarkan dan membantu orang lain mengidentifikasi dan menghindari hoax.

Dengan melakukan hal-hal ini, generasi milenial dan Gen Z akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam memerangi hoax dan membangun demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Teori demokrasi partisipatif menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik, sedangkan hoax dapat mengganggu partisipasi yang sehat.

Hoax dapat memengaruhi opini publik dan pemilihan umum. Warga negara mungkin membuat keputusan politik yang tidak didasarkan pada fakta jika mereka terpapar informasi palsu. Ini dapat menyebabkan demokrasi partisipatif menjadi kurang efektif karena keputusan yang dibuat tidak mencerminkan kehendak warga negara yang terinformasi dengan baik. Hoax juga dapat menimbulkan konflik dan ketegangan di masyarakat. Informasi palsu atau manipulasi fakta dapat merusak masyarakat dan memengaruhi hubungan antarnegara. Dalam demokrasi partisipatif, penting untuk menjalin diskusi yang konstruktif dan saling menghormati, yang dapat terganggu oleh bohong. Akibatnya, mengidentifikasi dan memerangi hoax sangat penting untuk mewujudkan demokrasi partisipatif yang kuat. Orang-orang di negara ini harus memiliki literasi media yang baik, keterampilan kritis, dan kemampuan untuk

memverifikasi informasi. Ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan membuat keputusan yang berdasarkan fakta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan generasi milenial dan gen Z punya peran penting dalam digitalisasi politik. Kita punya akses luas ke teknologi dan media sosial, yang bisa kita manfaatkan untuk menyebarkan informasi politik, memobilisasi massa, dan mengorganisir gerakan politik. Oleh karena itu Gen Z dan milenial, yang aktif terlibat dalam digitalisasi politik, dapat memiliki peran yang signifikan dalam membentuk masa depan politik. Kita memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi untuk mendukung prinsip-prinsip dan masalah yang kita pedulikan, serta untuk memastikan bahwa suara kita didengar dalam arena politik.

DAFTAR PUSTAKA

Boyke ledywatra (2023) gen z, milenial politik masa depan

<https://www.antaraneews.com/berita/3525420/gen-z,-milenial-politik-masa-depan>

Mustafa, C, E, B, Rahman, D, J Akbar, F, M, Septiadi, A, M. 2023, Pola Budaya Politik Gen Z Dalam Kontestasi Pemilu 2024 vol 4 no 232

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/view/29409>

Raihan Muhammad (2023) Milenial-Gen Z: Objek Politik Laris Jelang Pemilu

<https://www.pinterpolitik.com/ruang-publik/milenial-gen-z-objek-politik-laris-jelang-pemilu/>

Nabilah Muhammad (2023) jumlah pemilih pemilu 2024 berdasarkan kelompok usianya

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial>

CNN(2023) kacamata Gen Z dan milenial, bagaimana mereka memilih pilpres di 2024

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230810220313-617-984631/kacamata-gen-z-milenial-bagaimana-mereka-memilih-capres-di-2024>

Alvara Research Centre. (2014). Generasi Millennial Indonesia: Tantangan dan Peluang Pemuda Indonesia. Diakses dari website: <http://alvara-strategic.com/generasi-millennial-indonesia-tantangan-dan-peluang-pemuda-indonesia/>, pada 11 April 2018.

Green, Rebecca, Huang, Xiaoli. (2013). Classification of Digital Content, Media, and Device Types. OCLC Online Library Computer Center, Inc dan Sun Yat-Sen University. Diakses dari website:

Anshari, Faridhian. Oktober 2013, "Komunikasi Politik di Era Media Sosial" Jurnal

Komunikasi, Vol. 8, No. 1

2017. Partisipasi Politik Virtual Demokrasi Netizen di Indonesia. Jakarta: RMBOOKS

- Juditha, C., & Darmawan, J. J. (2010). Use of Digital Media and Millennial Generation's Political Participation. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 22(2), 91–105.
- Zis, S. F., Effendi, N., & Roem, E. R. (2021). Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 69–87. <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15550>
- Hasfi, N. (2019). Komunikasi Politik Di Era Digital. *Politika, Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), 93–111.